

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertahanan dan keamanan merupakan suatu simbol upaya dalam melindungi keberadaan suatu negara. Dengan adanya teknik proteksi yang kukuh selayaknya dapat memerankan benteng dalam menghadapi berbagai ancaman dan serangan yang datang dari luar. Dapat dilihat dari beberapa negara yang memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh dan terjamin, mereka memiliki kharisma di mata internasional. Negara adidaya (*superpower state*)<sup>1</sup> menempati posisi sebagai pemimpin dalam sistem internasional dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kesepakatan dan memasukan kepentingannya dalam proyek kekuatan dengan lingkup seluruh dunia yang semata-mata untuk menjaga kepentingan negaranya. Negara adidaya tersebut salah satunya adalah Amerika Serikat. Pandangan dunia internasional terhadap negara yang memiliki pertahanan yang kuat berbeda dengan negara yang memiliki pertahanan dan keamanan yang biasa. Negara dengan sistem pertahanan yang kuat memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan (konsensus) dalam lingkup internasional, seperti di daerah yang rawan konflik misalnya.

Amerika Serikat merupakan salah satu Negara adidaya, Negara yang memiliki potensi yang sangat besar di semua bidang, seperti ekonomi, militer, politik, dll, serta AS memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Dengan memiliki *national power* yang besar AS dengan gampang

---

<sup>1</sup> Encyclopaedia Britannica. Superpower.  
<https://www.britannica.com/topic/superpower>. diakses pada 21 April 2015  
pukul 22.00

memberi pengaruhnya di beberapa Negara demi tercapainya suatu kepentingan nasional. Selain itu juga AS sering mengintervensi suatu konflik di beberapa negara yang mengatasnamakan perdamaian dunia, menjadi polisi dunia, dan membantu Negara-negara berkembang atau negara-negara yang membutuhkan bantuan.

Sering dengan berkembangnya waktu, politik luar negeri Amerika Serikat dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain konflik yang masih terjadi di berbagai Negara dunia. Pada prinsipnya konflik terjadi karena benturan kepentingan diantara pihak-pihak yang bersengketa, namun dapat juga dilatarbelakangi oleh benturan kepercayaan dan motivasi sosial-ekonomi yang gagal mencapai kesepakatan jalan tengah (win-win solution).

Bagi Amerika Serikat, konflik yang terjadi di berbagai Negara dunia menjadi bagian penting bagi implementasi politik luar negeri Negara ini.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush pada tahun 2008 di gedung putih (white House).

Pernyataan President George W Bush pada saat beliau pidato di gedung putih tahun 2008 merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mencapai perdamaian dunia, dan Amerika Serikat tidak segan untuk mengintervensi konflik-konflik yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dunia. Seperti halnya Amerika Serikat mengintervensi konflik yang terjadi antara China dengan Taiwan.

Sejarah konflik China-Taiwan diawali dengan adanya pertentangan ideologi yang menyebabkan terjadinya perang saudara di China daratan antara Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis. Perang yang berakhir di tahun 1949 ini dimenangkan oleh kubu komunis yang kemudian membuat Kuomintang tergusur dan lari ke Taiwan. Di Taiwan,

---

<sup>2</sup> president Declare Freedom at War With Fear”, dalam <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>, diakses pada tanggal 12 juni 2015

Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek kemudian mendirikan pemerintahan yang tetap diberi nama Republik China. Chiang Kai-shek mendirikan pemerintahan ini dengan tujuan untuk tetap mempertahankan filosofis nasionalis. Pada tanggal 1 Oktober 1949 Mao Tse Tung selaku ketua partai komunis memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China menggantikan Republik China yang diproklamasikan tahun 1912 dan menyatakan Taiwan sebagai provinsi di dalam RRC.<sup>3</sup>

Berdirinya RRC pada tahun 1949 membuat kebijakan yang kerap disebut "*One China Policy*"<sup>4</sup> yang mengarahkan kepada suatu perumusan keputusan yang dipegang kukuh oleh RRC dengan pusat pemerintahan di Beijing, yang memutuskan bahwasannya hanya ada satu China yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas daratan tersebut dan mempunyai aspek keabsahan sebagai negara, yaitu Republik Rakyat China. dan keberadaan Republik China atau yang sekarang disebut Taiwan dengan pusat pemerintahan di Taipei dianggap bagian dari RRC. Pihak Beijing mendeklarasikan kepada forum internasional bahwa pihak Taiwan sudah seharusnya mematuhi keputusan yang ditetapkan oleh RRC yaitu *One China Policy*, karena pada kenyataannya Taiwan sudah terbalut pada konsensus yang telah disetujui oleh perutusan kedua belah pihak ditahun 1992 yang diselenggarakan di Hongkong.<sup>5</sup> Maka dari itu, RRC mengklaim bahwa keberadaan *one china policy* merupakan *status quo* yang tidak dapat diubah. Akan tetapi mantan presiden Taiwan, Chen Shui-bian, tidak ingin melegalkan doktrin *one china policy* tersebut. Terlebih, intrinsiknya sejak 1949, persatuan antara China and Taiwan tidak pernah tercipta. Taiwan terus

---

<sup>3</sup> BBC News. What's behind the China-Taiwan divide?.

<https://www.bbc.com/news/world-asia-34729538>. diakses pada 22 April 2015 pukul 16.21

<sup>4</sup>Congressional Research Service: Evolution of the "One China" policy, [http://assets.opencrs.com/rpts/RL30341\\_20090817.pdf](http://assets.opencrs.com/rpts/RL30341_20090817.pdf)

<sup>5</sup>Michal Roberge dan Youkyung Lee, *China-Taiwan Relations*, Council on Foreign Relations <http://www.cfr.org/publication.html?id=9223#2>, diakses tanggal 11 juni 2015.

memperjuangkan negosiasi demi mendapatkan kemerdekaan penuh sebagai sebuah negara yang tidak terikat dengan pengaruh RRC.

Dalam praktiknya, RRC memutuskan satu regulasi absout dalam berkorelasi dengan dunia internasional, yaitu dengan mempraktikkan satu mekanisme otoriter bahwa setiap negara yang ingin melapih hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China hendaklah menyingkirkan hubungan diplomatik dengan Taiwan, sebab RRC menganggap Taiwan telah tercantum dalam zona yang berada dalam area kekuasaan China. Hal ini lah yang membuat Taiwan ingin memerdekakan diri dari China. Akan tetapi usaha Taiwan kerap digagalkan oleh China. Dan konflik antara China Taiwan ini terjadi selama bertahun-tahun.

China melakukan upaya-upaya untuk merebut Taiwan agar kembali menjadi wilayah RRC, mulai dari statement-statement politik hingga pengerahan kekuatan militernya ke Taiwan agar Taiwan menjadi bagian dari RRC. Salah satunya seperti penyerangan militer China ke Taiwan dimana china meluncurkan rudal-rudalnya kesasaran Strategis di Taiwan.<sup>6</sup>

Selain itu juga China mengerahkan armada lautnya ke selat Taiwan untuk menyerang Taiwan dan serangan China berhasil melumpuhkan sebagian kekuatan militer Taiwan dan juga sebagian besar pulau Taiwan berhasil dihancurkan China.<sup>7</sup> Dan China telah menyiapkan armada besar laut dan udara, untuk menghajar pulau Kinmen basis pertahanan pertama pasukan Taiwan yang diperkirakan berkisar 3 brigade

---

<sup>6</sup> Kompasiana. Perang china vs Taiwan, kartu as usa untuk melemahkan cina. [http://www.kompasiana.com/kasamago/perang-cina-vs-taiwan-kartu-as-usa-untuk-melemahkan-cina\\_550aed1da333119c1e2e3afb](http://www.kompasiana.com/kasamago/perang-cina-vs-taiwan-kartu-as-usa-untuk-melemahkan-cina_550aed1da333119c1e2e3afb). diakses pada 23 April 2015 pukul 15.11

<sup>7</sup> Republika. Militer cina siapkan serangan ke Taiwan. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/28/nww31238-3-militer-cina-siapkan-serangan-ke-taiwan>. diakses pada 23 April 2015 pukul 16.00

(10.000 pasukan) dengan artileri dan rudal pendek.<sup>8</sup> Hal ini dilakukan sebagai ancaman untuk Taiwan agar Taiwan menyerah dan masuk dalam bagian RRC.

Persengketaan tersebut membuat Taiwan menjadi kalang kabut dan membutuhkan dukungan dari Negara lain untuk dapat *membbackup* kekuatan militer mereka yang tidak sebanding dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh China. Oleh karena itulah Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kekuatan militer besar melakukan inisiatif untuk membantu Taiwan dalam hal persenjataan militer mereka. Dengan adanya bantuan militer dari Amerika Serikat kepada Taiwan, membuat persengketaan Taiwan dengan China semakin tidak terbendung.

Kondisi seperti ini membuat Amerika Serikat melakukan inisiatif dengan menjual dan menyediakan senjata canggih ke Taiwan dengan atau atas permintaan Taiwan sendiri. Melalui persenjataan tersebut, Taiwan berusaha untuk membentuk *image* negara yang memiliki *power* (kekuasaan).<sup>9</sup>

Jika kita lihat dari akar sejarah berawalnya hubungan AS dengan Taiwan yaitu berawal dari perang Korea. Perang saudara antara Korea Selatan dengan Korea Utara, AS dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi sokongan kepada Taiwan begitu juga dengan Korea Utara disokong oleh China. Dampak dari perang tersebut menarik AS untuk melakukan persetujuan resmi dengan pemerintah Taiwan, yaitu *Mutual Defence Treaty* di tahun 1954, perjanjian antara AS-Taiwan ini merupakan kewajiban AS dalam melindungi dan membantu Taiwan dalam mengatasi problema ancaman dari China.<sup>10</sup> Dengan adanya perjanjian MDA ini AS banyak menyediakan dan memberi bantuan

---

<sup>8</sup> Jakarta Greater. Invasi China ke Taiwan.

<http://jakartagreater.com/skenario-invasi-china-ke-taiwan/>. Diakses pada 23 April 2015 pukul 16.31

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hlm.

<sup>10</sup> Sejarah Taiwan R.O.C.K MinistriesTaiwan, dalam

<http://gbirocktaiwan.com/category/taiwan/sejarah/> di akses tanggal 24 April 2015 pukul 09.00.

ekonomi maupun pada sektor militer Taiwan, guna keamanan dan pertahanan Taiwan, dan juga demi masa depan pembangunan Taiwan.

Keputusan Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan Taiwan dan menyetujui pemenuhan perlengkapan senjata ke Taiwan tidak lain karena AS telah menyetujui kontrak kerjasama dengan Taiwan melalui *Taiwan Relations Act* (TRA)<sup>11</sup> pada tahun 1979, yang memberi AS tanggung jawab dalam menjaga dan menerapkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihaknya bersama Taiwan. TRA sendiri merupakan undang-undang yang menetapkan AS dalam memelihara perdamaian, ketenteraman, dan keseimbangan di kawasan Oceania serta mengenalkan kebijakan luar negeri AS dalam hubungannya dengan Taiwan, dan kesepakatan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Melalui kesepakatan tersebut, ternyata menjadi senjata Taiwan agar AS dapat mendukung usaha Taiwan dalam melepaskan diri dari pengaruh RRC dan berdiri menjadi suatu negara sendiri yang terpisah dari campur tangan RRC. Diharapkan dengan terpenuhinya sistem pertahanan-diri yang memadai serta dukungan yang AS berikan pada Taiwan dapat memudahkan Taiwan untuk mewujudkan kemerdekaannya secara legal.

Dengan adanya kesepakatan dalam TRA inilah yang akhirnya meligitimasi Taiwan untuk memperoleh suplai persenjataan dari Amerika Serikat melalui transaksi perdagangan bilateral. Bukan hanya senjata-senjata canggih yang diperoleh Taiwan dari AS, melainkan dukungan perangkat lunak yang besar dan alat-alat transportasi militer canggih lainnya. Selain itu juga AS mengirim beberapa pasukan militernya ke laut china selatan untuk menjadi sekutu Taiwan dan menjaga keamanan wilayah Taiwan.

Hubungan kerjasama di bidang militer antara AS dan Taiwan ini menuai kecaman dari RRC (Republik Rakyat China). Karena RRC menganggap AS telah melanggar

---

<sup>11</sup> Brookings. Thoughts on the Taiwan Relation Act.  
<https://www.brookings.edu/opinions/thoughts-on-the-taiwan-relations-act/>.  
Diakses tanggal 25 April 2015 pukul 01.00.

kesepakatan yang telah dibuat oleh Amerika dengan China dalam *Joint Communiqué*, yang diratifikasi pada 1 Januari 1979.<sup>12</sup> Esensialnya *Joint Communiqué* ini merupakan persetujuan Amerika untuk mengakui eksistensi satu China, dan Taiwan sebagai teritori yang berada di bawah bendera China, sehingga Amerika seharusnya menghindari niat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. RRC mendesak AS untuk membatalkan penjualan senjata ke Taiwan, karena penjualan senjata tersebut dinilai akan melanggar kepentingan keamanan China, dan merusak kepercayaan militer china terhadap Amerika Serikat, yang sebelumnya sudah melakukan kerjasama dibidang militer sejak pasca perang dingin usai. AS dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri RRC mengenai permasalahan Taiwan yang masih menjadi bagian dari wilayah RRC.<sup>13</sup> Dan hal ini akan berpengaruh dalam hubungan bilateral antara AS dengan RRC kedepannya.

Hubungan kerjasama antara AS dengan Taiwan ini tidak hanya memberi dampak bagi perkembangan militer di Taiwan akan tetapi juga memberi dampak bagi pembangunan perekonomian Taiwan. Pembangunan ekonomi Taiwan berlangsung dengan pesat dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini memberi dampak yang cukup besar terhadap aspek kehidupan di Taiwan, salah satu diantaranya adalah aspek pertahanan keamanan dan politik. Hingga di tahun 2000an persenjataan di Taiwan meningkat secara signifikan.<sup>14</sup>

Akan tetapi dari tahun ketahun konflik antara China-Taiwan ini semakin lama semakin mereda, konflik China-Taiwan ini mulai mereda pasca terpilihnya presiden Ma Ying

---

<sup>12</sup>*Joint Communiqué of the USA and the People's Republic of China on the Establishment of Diplomatic Relations, 1979*

<sup>13</sup>Kompas. China desak AS batalkan penjualan senjata ke Taiwan. <http://internasional.kompas.com/read/2010/01/09/19455387/China.Desak.A.S.Bata>. Diakses tanggal 21 April 2015 pukul 02.29.

<sup>14</sup><http://post.mnd.gov.tw/english/Publish.aspx?cnid=514&p=729>. Diakses tanggal 24 April 2015 pukul 16.00.

Jeou sebagai Presiden Taiwan sejak 20 Mei 2008 lalu, dimana Ma Ying Jeou meningkatkan interaksi dan integrasi ekonomi selat Taiwan dengan tujuan tercapainya kedekatan politik dan persetujuan perdamaian antara Beijing dan Taipei.<sup>15</sup> Upaya yang dilakukan oleh Taiwan ini merupakan kelanjutan dari adanya perjanjian untuk mengurangi konflik militer yang telah disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun 2005. Hubungan kedua negara ini secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan, sudah tidak ada lagi gesekan-gesekan militer secara langsung apalagi perang terbuka. Diantara keduanya sudah mulai mengakui dan menghargai kedaulatan negara satu sama lain.<sup>16</sup>

Hal ini juga dibuktikan dengan dilihat dari hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh China-Taiwan, yang berawal dari bergabungnya China kedalam *World Trade Organization* (WTO) pada 2001, yang kemudian pada 1 Januari 2002 disusul oleh Taiwan. Masuknya Taiwan ke WTO ini tentunya setelah mengalami proses yang panjang, yaitu setelah melalui proses pengajuan aplikasi pendaftaran selama 12 tahun. Di WTO Taiwan sendiri dikenal sebagai “Chinese Taipei”. Dengan status sebagai sesama anggota WTO, maka hubungan perdagangan China-Taiwan semakin erat. Bahkan pada 2007 lalu, perdagangan bilateral antara China-Taiwan mencapai omset 102 milyar US dollar, padahal pada tahun 1991 hanya mencapai angka 8 milyar US dollar. Data ini mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan dari transaksi ekonomi bilateral antara China-Taiwan. Dalam perkembangan selanjutnya, Taiwan mulai mengakui China sebagai patner bisnisnya yang paling prospektif, buktinya pada tahun 2007 saja, 30% kuota ekspor Taiwan disirkulasikan ke

---

<sup>15</sup>Keng, Shu & Gunter Schubert. 2010. Agents of Taiwan-China Unification? The Political Roles of Taiwanese Business People in the Process of Cross-Strait Integration. dalam *Asian Survey*, Vol. 50, No. 2. California: University of California Press., Hal. 287-310.

<sup>16</sup> Dinamika Perkembangan Taiwan, dalam [http://dwi-suta-mentari-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-139853-MBP%20Asia%20Timur-Dinamika%20Perkembangan%20Taiwan.html](http://dwi-suta-mentari-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-139853-MBP%20Asia%20Timur-Dinamika%20Perkembangan%20Taiwan.html)



pasar China. Sebaliknya bagi China, Taiwan pun masuk ke dalam daftar *Top Ten China's Trading Partners*. Setidaknya sejak tahun 1998, pelaku bisnis dari Taiwan telah berinvestasi di pasar China senilai 150 milyar US dollar. Bahkan tahun 2009 telah menandai peningkatan penerbangan langsung antara China dan Taiwan dari 108 kali per minggu menjadi 270 kali, artinya mobilisasi masyarakat dari China ke Taiwan dan sebaliknya semakin meningkat.<sup>17</sup>

Ternyata meredanya konflik China-Taiwan yang ditunjukkan dengan intensitas kerjasama-kerjasama bilateral antara dua negara, tidak menggoyahkan AS untuk berhenti bekerjasama militer dengan Taiwan. Dimana AS tetap menjadi pemasok senjata utama Taiwan. Sejak rezim Jimmy Carter, George Walker Bush hingga memasuki rezim Trump AS masih terus konsisten menjadi *provider* persenjataan bagi Taiwan dan terus menunjukkan komitmennya untuk menjalin kerjasama dengan Taiwan. Hal ini terjadi bukan hanya karena AS memiliki komitmen untuk melakukan apa saja guna mengakomodir kepentingan negaranya, melainkan AS memiliki kepentingan-kepentingan lainnya yang bersifat pribadi dan ada sesuatu yang tersembunyi yang ingin dicapai AS dalam hubungan kerjasama militer ini, serta menjaga kepentingan dan tujuan awal negaranya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dengan mengingat keterkaitan dengan judul ini, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah “Mengapa Amerika Serikat tetap melanjutkan hubungan kerjasama militernya dengan Taiwan meskipun konflik antara Taiwan dengan China telah mereda ?”

## **C. Kerangka Teoritis**

---

<sup>17</sup> Michal Roberge dan Youkyung Lee, *China-Taiwan Relations*, <http://www.cfr.org/publication.html?id=9223#2> diakses tanggal 6 oktober 2015, pukul 13.00

Untuk menjelaskan latar belakang masalah yang dibahas penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu konsep kebijakan Politik Luar Negeri dan konsep Balance Of Power. Kedua kerangka pemikiran ini dipandang relevan dengan kasus yang sedang dibahas karena mampu menjabarkan secara terperinci tentang kepentingan Amerika Serikat dalam kerjasama militer dengan Taiwan pasca konflik China dan Taiwan.

### **C.1. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “action theory”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Pada definisi lainnya juga disebutkan bahwa, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.<sup>18</sup>

Menurut K. J. Holsti, kebijakan politik luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perbuatan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai skema atau pola dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu berhadapan dengan negara lain atau sekelompok negara lain. Jika disimpulkan menurut K J Holsti, kebijakan politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam

---

<sup>18</sup> Yanyan Mohammad Yani, *Politik Luar Negeri*, Universitas Padjajaran Publishing, Bandung, 2009, hal 12.

hubungannya dengan negara lain. Dalam arti luas, pengertian politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.<sup>19</sup>

Ada juga beberapa tokoh mengungkapkan bahwa dalam membuat kebijakan politik luar negeri para pengambil keputusan tidak bertindak tanpa pertimbangan, tetapi sebaliknya. Negara akan mempertimbangkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan apa yang negara dapatkan dalam kebijakan tersebut, dan bagaimana cara negara itu untuk mempertahankan kepentingannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dimana setiap Negara di dunia pasti memiliki kepentingan masing-masing dan salah satu cara untuk memenuhi kepentingan nasional Negara tersebut adalah dengan melakukan interaksi atau kerjasama dengan Negara lain melalui kebijakan yang tercantum dalam politik luar negeri. Konsep ini dipergunakan untuk membantu penulis dalam menjelaskan kepentingan yang ingin dicapai AS melalui kebijakan luar negerinya dalam hubungan kerjasama militer dengan Taiwan pasca konflik China-Taiwan.

Menurut Hans J. Morgenthau mengenai kepentingan nasional yaitu kepentingan nasional sebagai “usaha untuk menjaga kelangsungan hidup negara-bangsa melalui pemenuhan kepentingan yang vital dengan menggunakan kekuasaan secara bijaksana.”<sup>20</sup> Morgenthau juga menyatakan bahwa berkecimpung dalam politik internasional, negara memiliki tujuan yang harus terpenuhi, yaitu mencapai kepentingan nasional, bukan kepentingan “sub-nasional” dan juga “supra-nasional”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> K.J. Holsti, 1992. Politik Internasional: suatu kerangka analisis. Bandung: Bina Cipta, hal 21

<sup>20</sup> Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Lp3es, Jakarta, 1990, hal 18.

<sup>21</sup> Ibid.

Lebih jauh menurut Morgenthau kepentingan nasional dari setiap negara adalah mengejar kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat diciptakan melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.<sup>22</sup>

Kepentingan nasional suatu Negara adalah merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya dan tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu Negara. Mengacu pada Roy Olton dan Jack Plano menjelaskan bahwa tujuan politik luar negeri setiap negara pasti berbeda satu sama lain, tetapi pada umumnya berkisar pada beberapa hal, seperti :<sup>23</sup>

**C.1.1. Pertahanan Diri (self-preservation),**

adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk mempertahankan diri agar Negara yang memiliki power besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan, untuk mempertahankan diri tersebut negara yang bersangkutan melakukan kerjasama bilateral ataupun dalam wadah organisasi internasional.

**C.1.2. Kemerdekaan (independence),**

adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan dengan melakukan kerjasama dengan Negara lain dengan tujuan agar Negara tersebut tidak dijajah atau tunduk kepada Negara lain.

**C.1.3. Integritas territorial (territorial integrity),**

---

<sup>22</sup>Ibid, hal. 140

<sup>23</sup>Jack C.Plano dan Roy Olton.1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin

adalah kepentingan nasional yang tujuannya mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan.

**C.1.4. Keamanan Militer (military security),**

adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk menjaga negaranya dari kekuatan militer negara lain atau sebagai antisipasi dari gangguan militer negara lainnya.

**C.1.5. Kemakmuran Ekonomi (economic wellbeing),**

adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri. Hal ini merupakan faktor penting karena ekonomi merupakan variable penting yang turut menentukan kemajuan suatu negara. Selain itu, ekonomi juga menjadi faktor dominan dalam menentukan citra suatu negara di mata internasional.

Setelah melihat paparan pada pembuatan kebijakan luar negeri K J Holsti dan kebijakan luar negeri yang diterapkan Amerika Serikat dapat disimpulkan dari kelima kensepsi tentang kepentingan nasional diatas salah satunya kepentingan nasional AS yang tetap melanjutkan hubungan kerjasama militernya dengan Taiwan meskipun konflik China-Taiwan telah meredah, yaitu :

**Kemakmuran Ekonomi (Economic Wellbeing)**

Mengaitkan hubungan kerjasama militer AS-Taiwan dengan kensepsi kepentingan nasional yang telah dijabarkan oleh Roy Olton dan Jack Plano diatas maka kepentingan nasional AS ialah ingin mempertahankan stabilitas perekonomian AS dan perkembangan perekonomian AS.

Sejak berakhirnya perang dunia II Amerika Serikat memiliki kekuatan ekonomi yang besar, bahkan

mata uang dollar merupakan mata uang yang dijadikan sebagai acuan untuk negara-negara seluruh dunia.<sup>24</sup> Kekuatan ekonomi sangat penting dimana sumber-sumber ekonomi merupakan penentu utama kekuatan negara dan memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan negara lain. Selain kemampuan untuk mendanai upaya perang dan meningkatkan sistem pertahanan negara, ekonomi juga dianggap dapat memberi citra terhadap kemampuan suatu Negara, karena Negara yang memiliki perekonomian yang kuat maka Negara tersebut akan diperhitungkan dalam perpolitikan internasional dan akan disegani oleh negara-negara lainnya. Hal itulah yang dilakukan AS, dengan AS memiliki kekuatan ekonomi yang besar maka AS dengan mudah mendapatkan kepentingan dan kebutuhan negaranya hingga mampu menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara lain.

Namun krisis ekonomi yang melanda AS ditahun 2001 menimbulkan suatu pernyataan dikalangan dunia bahwa AS tidak lagi menjadi negara yang terkuat didunia (unipolar). Akan tetapi hal tersebut tidak akan membuat AS tinggal diam dengan keadaan negaranya. Tentunya AS memiliki strategi-strategi untuk mengembalikan citranya sebagai kekuatan perekonomian dunia dan mengembalikan lagi stabilitas perekonomiannya. Salah satu caranya dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Presiden AS melakukan beberapa kunjungan ke negara-negara Asia yang bertujuan agar negara-negara Asia bersedia menjadi mitra dagang AS. Dengan demikian, AS mampu memperluas hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia dan menambah nilai ekspor untuk menunjang perekonomian negaranya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu kerjasama militer AS dengan Taiwan, dimana Taiwan menjadi pasar militer AS. Taiwan menyediakan pangsa pasar yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Amerika Serikat. Amerika

---

<sup>24</sup><http://www.bimbie.com/perekonomian-amerika-serikat.htm>

Serikat melancarkan ekspansinya dalam meningkatkan koordinasi ekonominya ke negara-negara yang memiliki kekuatan industri terutama wilayah Asia Timur yang saat ini merupakan perluasan ekspor Amerika Serikat.<sup>25</sup>

Pada saat AS mengalami krisis ekonomi dan di saat itu China tumbuh menjadi kekuatan baru dunia. Pertumbuhan ekonomi China dalam beberapa dekade meningkat dengan pesat. Dari pertengahan tahun 1980-an sampai akhir 1990-an ekonomi China tumbuh rata-rata 10 persen pertahun. Berlanjut dari akhir tahun 1990-an sampai 2005 pertumbuhan ekonominya tumbuh 8 persen ke 9 persen tiap tahun. Pada 2006 kecepatan pertumbuhan pertahun China diatas 11 persen dan itu berlanjut sampai 2007. Pertumbuhan ekonomi China mengarah pada kemunculannya sebagai kekuatan besar dan ini adalah pola yang sudah lazim dalam politik internasional. Kekuatan ekonomi negara tumbuh pada kecepatan yang berbeda, artinya beberapa negara selalu memperoleh kekuatan dan beberapa menghilangkan kekuatan relatif yang lain.

Dan hal itulah sebagai salah satu alasan mengapa AS tetap mempertahankan hubungan kerjasama militernya dengan Taiwan pasca konflik China-Taiwan mereda. Secara logika AS tidak perlu lagi *memback-up* Taiwan dari ancaman China, karena diantara keduanya konflik sudah mereda, dan seiring berkembangnya waktu Taiwan pun juga dianggap sudah mampu menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya sendiri, dilihat dari perkembangan militer dan perekonomian Taiwan sudah maju dan memadai. Akan tetapi AS tetap melanjutkan hubungan kerjasamanya dengan Taiwan, karena AS menganggap Taiwan sebagai mitra yang dapat menguntungkan AS. Dan hubungan kerjasama ini

---

<sup>25</sup>Politik global. Hubungan kerjasama us Taiwan dalam persenjataan militer dan ekonomi. <https://politikglobalus4.wordpress.com/2015/06/29/hubungan-kerjasama-us-taiwan-dalam-persenjataan-militer-dan-ekonomi/>. Diakses pada 25Maret 2015. Pukul 18.45

dianggap sebagai alternatif yang paling ideal atau optimal dalam mencapai kepentingan nasional negara AS. Dan AS pun dapat menjaga perkembangan ekonomi negaranya, karena tidak dapat dipungkiri jika hubungan kerjasama AS-Taiwan tidak dilanjutkan lagi dengan memberhentikan penjualan senjata ke Taiwan, maka perekonomian AS secara tidak langsung akan sedikit menurun, dan kemungkinan besar hal buruk yang tidak diinginkan AS akan terjadi seperti, krisis ekonomi AS yang dulu sempat melanda AS akan terulang kembali.

Dalam hubungan kerjasama ini bukan hanya AS yang memiliki kepentingan, tetapi Taiwan pun memiliki kepentingan terhadap hubungan kerjasama ini. Dimana Taiwan masih membutuhkan AS sebagai citranya dimata dunia sebagai sekutu AS, yang pastinya membuat negara-negara lain akan segan dan berpikir dua kali jika ingin menyerang Taiwan. Taiwan masih membutuhkan AS sebagai tameng keamanan dan kedaulatan negaranya. Jadi dalam konteks hubungan kerjasama ini bukan hanya AS yang masih membutuhkan Taiwan, akan tetapi Taiwan pun masih membutuhkan AS. Jadi hubungan kerjasama ini memberi dampak positif bagi kedua negara tersebut.

## **C.2. Balance Of Power**

Konsep *Balance of power* adalah salah satu teori tertua dalam studi hubungan internasional. Konsep yang menjelaskan pola perang dan damai yang telah berlaku di antara negara-bangsa selama ini. Perlakuan secara hati-hati perimbangan kekuasaan dipercaya para ahli akan mampu menciptakan suatu peradaban. Para ahli berpendapat bahwa dalam *balance of power* tidak hanya mengandung ungkapan yang mengarah kepada kemampuan militer dan penangkalan saja, tetapi juga terhadap seluruh struktur yang mengatur hubungan antar negara. Namun, meskipun begitu konsep ini telah mendapat kritik yang cukup besar, sebagian karena kurangnya definisi yang relevan. Sejarawan, ilmuwan



politik, dan negarawan telah menggunakan konsep tersebut dalam cara yang berbeda dan seringkali dengan perbedaan penting dalam arti, dan yang terjadi kemudian adalah sering terjadinya kontradiksi antara pandangan satu dan yang lainnya. Definisi yang biasanya muncul sering berarti penerapan kekuatan militer, tetapi terkadang juga lebih merujuk keunggulan ekonomi atau persuasi diplomatik untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh negara tertentu, atau dalam hal ini kelompok negara-negara tertentu. Di beberapa kesempatan *balance of power* sendiri sering diartikan sebagai kemampuan dari entitas politik tertentu untuk memaksakan kehendaknya pada pihak yang lain. Perimbangan yang terjadi kemudian di pahami dalam kerangka Unipolar, Bilapolar, dan Multipolar.<sup>26</sup>

Secara teoritis, Balance Of Power menganggap bahwa perubahan status dan kekuatan internasional khususnya upaya sebuah negara yang hendak menguasai sebuah kawasan tertentu, akan dapat menstimulir aksi *counter-balancing* dari satu negara atau lebih. Dalam keadaan yang demikian, proses perseimbangan kekuatan dapat mendorong terciptanya dan terjaganya stabilitas hubungan antar negara yang beraliansi alias merasa terancam.

Secara sistematis, *balance of power* digunakan untuk mencegah terjadinya sistem hegemoni yang didefinisikan sebagai sebuah dominasi suatu Negara terhadap Negara atau kelompok Negara lain. Dengan kata lain, *balance of power* ini muncul karena adanya suatu pengaruh besar dalam bidang militer, dan teknologi oleh negara pemilik *power* besar, yang kemudian disebut sebagai hegemoni. Walaupun pada kenyataannya, hegemoni suatu negara itu tidak dapat dihilangkan dengan

---

<sup>26</sup> Scribd. Balance of power. Lihat:  
<http://www.scribd.com/doc/70557584/Essay-Balance-of-power>

menggunakan system perimbangan kekuatan (*balance of power*).<sup>27</sup>

Dalam sistem internasional ada tiga asumsi dasar mengenai perimbangan kekuasaan. *Pertama*, setiap Negara berusaha untuk memaksimalkan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya sendiri. *Kedua*, apabila akumulasi kekuasaan dan kepentingan antar Negara bentrok, maka tercipta kemungkinan konflik internasional. *Ketiga*, untuk meningkatkan potensi kekuasaan masing-masing, negara-negara yang sepemikiran akan membentuk persekutuaan, sehingga persaingan antar persekutuan lebih mewarnai sistem tersebut daripada persaingan antar negara. Persaingan antar persekutuan menciptakan keseimbangan, sekalipun ketidakseimbangan itu menguntungkan.<sup>28</sup>

Merujuk pada pemaparan diatas seperti yang kita ketahui Amerika Serikat merupakan negara adi kuasa, dimulai sejak munculnya AS sebagai pemenang perang dingin, maka dimulailah fase ketika sistem internasional menjadi bersifat unipolar. AS menjadi negara yang berkuasa di dunia dengan berbagai aset yang dimilikinya. Seperti yang dikatakan oleh Longin Patusiak, AS memiliki kemampuan militer, ekonomi, teknologi dan keuangan yang mendukung. AS juga didukung dengan kemampuan diplomasinya yang sangat kuat. Perkembangan AS sendiri bukannya tanpa cela. Saat ini dapat dikatakan hegemoni AS mulai menurun. Krisis keuangan yang melanda pada tahun 2008 sempat menggoyahkan posisi AS sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Goyahnya kekuatan ekonomi AS ini mulai memunculkan pergeseran kekuatan dunia. China dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya saat ini mulai menjadi salah satu kekuatan baru dunia,

---

<sup>27</sup> Keterkaitan balance of power. <http://theamazing-grace.blogspot.com/2010/03/keterkaitan-power-balance-of-power-dan.html>. diakses pada 24 maret 2015. Pukul 20.02

<sup>28</sup> Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan dunia 2*, Hal 43

disamping itu sistem pertahanan dan keamanan China pun telah meningkat dan memadai. Pengaruh dan posisi China dalam dunia internasional telah diakui kemampuannya sehingga segala tujuan yang ingin dicapai China bukan hal yang sulit untuk mewujudkannya. Kebangkitan China sebagai kekuatan baru dunia ini membuat beberapa negara khawatir akan kedudukannya sebagai negara *super power*. Salah satunya adalah Amerika Serikat, dengan bangkitnya China sebagai kekuatan baru dunia membuat AS khawatir akan pengaruhnya di kawasan Asia Timur nantinya. Melihat AS memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan nasionalnya di beberapa kawasan Asia membuat AS mengambil suatu kebijakan untuk dapat menyeimbangi kekuatan China di Asia. Salah satunya dengan tetap mempertahankan hubungan kerjasama militernya dengan Taiwan yang dianggap dapat menjaga eksistensi AS dikawasan Asia dan tetap mempertahankan hegemoninya dikawasan Asia.

Walaupun konflik antara China-Taiwan sudah mereda akan tetapi AS tetap mempertahankan posisinya sebagai aliansi militer Taiwan dan selalu membantu Taiwan, dengan tujuan membendung kekuatan China di kawasan Asia dan AS tetap ingin menunjukkan eksistensinya sebagai negara *super power* dan negara yang berpengaruh di kawasan Asia semenjak perang dingin hingga sekarang di era pemerintahan Trump.

Selain ingin menyeimbangi kekuatan China di Asia Timur, AS juga tidak ingin China mendominasi dan menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia Timur, sehingga mempersulit AS untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya di kawasan Asia dan pastinya akan mengganggu kedudukan AS sebagai negara adi kuasa.

#### **D. Hipotesa**

Setelah melihat uraian latar belakang dan rumusan masalah serta kerangka konseptual diatas maka dapat di ambil hipotesa :

Amerika Serikat tetap melanjutkan hubungan kerjasama militernya dengan Taiwan meskipun konflik antara Taiwan dengan China telah mereda karena :

1. Hubungan kerjasama militer yang dilakukan AS dengan Taiwan memberi dampak yang positif bagi perekonomian AS dalam perdagangan senjata, dengan alasan Taiwan dianggap sebagai salah satu pasar militer terbesar AS.
2. Amerika Serikat tetap ingin menjaga eksistensinya di kawasan Asia Timur dan dapat menyeimbangi kekuatan China di kawasan tersebut yang menjadi kekuatan baru dunia.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan penjabaran tentang,

1. Untuk memaparkan kepentingan AS yang tetap mempertahankan hubungan kerjasama militernya dengan Taiwan
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang didapatkan AS dalam hubungan kerja sama tersebut

#### **F. Jangkauan Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Fokus utama dari penulisan ini adalah membahas Apa kepentingan Amerika Serikat dalam Kerjasama Militer dengan Taiwan Pasca Konflik China dan Taiwan telah mereda. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan diluar batasan tersebut. Menengok kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, dengan catatan diperhatikan relevansinya.

## **G. Metode Penelitian**

Penulisan ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui study kepustakaan (library research), berdasarkan data-data sekunder baik dari buku, majalah, artikel, jurnal, surat kabar, internet, maupun bentuk-bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan objek penulisan.

## **H. Perencanaan Sistematika**

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab. Adapun sistematika penulisan dari skripsi yang penulis angkat adalah :

**BAB I** : Pendahuluan, yang berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Sejarah penyebab konflik antara China-Taiwan dan dinamika konflik antara China dan Taiwan dari tahun ke tahun. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah atau pemicu yang menyebabkan konflik antara China dan Taiwan ini terjadi. Serta menjelaskan dinamika konfliknya dari tahun ke tahun hingga konflik diantara keduanya meredam hingga saat ini.

**BAB III** : Kerjasama militer AS dengan Taiwan. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang sejarah, bentuk, dan perkembangan terkini mengenai kerjasama militer AS dengan Taiwan.

**BAB IV** : Membahas mengenai pembuktian hipotesa yang menjelaskan tentang kepentingan AS dibalik kerjasama militernya dengan Taiwan yang dilihat dari dua kepentingan, antara lain kemakmuran ekonomi AS dan menyeimbangi kekuatan China di kawasan Asia Timur

**BAB V** : Kesimpulan dan Saran